



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas ruang penyimpanan arsip;
- b. bahwa kondisi volume dan kapasitas ruangan penyimpanan arsip fisik di gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan penyusutan arsip yang telah melampaui jangka waktu simpan inaktif menurut jadwal retensi arsip;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya, diperlukan Panitia Penilai Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
3. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1635);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan rapat Panitia Penilai Arsip dan mencantumkan hasil rapat dalam notula;
- b. menetapkan daftar arsip musnah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip;
- c. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan Arsip atau Surat Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan;
- d. menerima persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Unit Kearsipan;

e. melakukan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. melakukan pemusnahan arsip secara total dengan cara mencacah, melebur dengan bahan kimia, membakar, atau cara lain yang memenuhi kriteria arsip usul musnah secara total;
- f. melaksanakan pengawasan secara langsung sepanjang pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana mestinya;
- g. mendokumentasikan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
- h. menetapkan daftar arsip usul serah;
- i. menerima persetujuan serah berdasarkan Surat Persetujuan Arsip dari Kepala ANRI melalui Unit Kearsipan;
- j. menetapkan daftar arsip serah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip;
- k. menyiapkan Berita Acara Penyerahan Arsip sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan; dan
- l. melakukan penyerahan arsip kepada ANRI.

KETIGA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 047.01.1.427944/2021 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 145 Tahun 2022 tentang Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. NIP. 196603241991081001	Sekretaris Kemen PPPA	Penanggung Jawab	-
2.	Ambarwati, S.E, M.M. NIP. 196502161992082001	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kemen PPPA	Ketua	-
3.	Frangky Tielung, S.T. NIP. 197102262005021003	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Kemen PPPA	Sekretaris	-
4.	Drs. Tato Pujiarto NIP. 196401101991081001	Koordinator Kelompok Substansi Arsip I Direktorat Akuisisi, ANRI	Anggota	Rp500.000,00
5.	Sri Wulan Nugrahayu NIP.196905051993032001	Arsiparis Penyelia Direktorat Akuisisi, ANRI	Anggota	Rp500.000,00
6.	Dimas Pratama Yuda, S.Sos. NIP. 198611072018011001	Arsiparis Ahli Pertama Direktorat Akuisisi, ANRI	Anggota	Rp500.000,00
7.	drg. Dewi Respatiningsih NIP. 197804262000122001	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA	Anggota	-



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

8.	Nurul Khakhimah, S.AB NIP. 197210041995032001	Plt. Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA	Anggota	-
9.	Ir. Prijadi Santoso, M.Si. NIP. 196807051998121002	Plt. Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat, Kemen PPPA	Anggota	-
10.	Dra. Dyah Elvina NIP. 196807141988102001	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA	Anggota	-
11.	Ir. Destri Handayani, M.E. NIP. 196711161997032001	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	-
12.	Drs. Fatahillah, M.Si NIP. 196806201993121001	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemen PPPA	Anggota	-
13.	Dian Rahmawati, S.Sos., M.M. NIP. 197811062006042022	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kemen PPPA	Anggota	-
14.	Prita Ismayani Sriwidyarti, S.Sos., M.T. NIP. 198410072008012003	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kemen PPPA	Anggota	-
15.	Chitra Febianty Luthfi, S.Sos. NIP. 198002052009022001	Arsiparis Ahli Muda, Kemen PPPA	Anggota	-
16.	Duladi, A.Md. NIP. 198804082020121005	Pelaksana/Terampil - Arsiparis, Kemen PPPA	Anggota	-
17.	Sutikno, S.AP. NIP. 197009221995031001	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA	Anggota	-
18.	Supriyanto NIP. 196710281990121001	Perencana Ahli Muda pada Deputy Bidang Partisipasi	Anggota	-



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		Masyarakat, Kemen PPPA		
19.	Hartini NIP. 197202071995032001	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA	Anggota	-
20.	Nur Amalia, A.Md. NIP. 197607212003122001	Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	-
21.	Ludwie Anggara Samodra, S.K.M., M.I.Kom. NIP. 198208242009121002	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemen PPPA	Anggota	-
22.	Lucia Yulianti NIP. 196707212006042008	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kemen PPPA	Anggota	-
23.	Tasripul Iman NIP. -	Pelaksana pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA	Anggota	-

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU

